



STRATEGI MENGATASI STUNTING KAMPUNG NELAYAN DI SULAWESI BARAT

Hariyanto, Raden Dwiarto, Aditya Randika

Analisis Kebijakan

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah dari standar yang ditetapkan untuk usia dan jenis kelamin tertentu, biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah nelayan lebih dari 2,5 juta. Isu permasalahan yang dihadapi keluarga nelayan adalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya pangan yang bergizi dan *stunting* (BPS, 2022).

Meskipun berada dekat sumber daya laut, tetapi pola konsumsi makanan tidak seimbang, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi mengakibatkan kekurangan asupan nutrisi yang diperlukan dalam pertumbuhan anak. Dampak dari *stunting* pada anak-anak daerah pesisir tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan belajar. (F. Morales, 2023).



Ditujukan Kepada

1. Pemerintah Daerah Majene
2. Layanan Kesehatan Daerah Majene
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Ringkasan Eksekutif

Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, terutama di kawasan pesisir seperti kampung nelayan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pendanaan kesehatan yang terbatas, kurangnya akses terhadap pangan bergizi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi, keterbatasan dukungan infrastruktur dan sanitasi belum optimal, jaringan infrastruktur yang belum tertata serta ketidakstabilan ekonomi keluarga nelayan.

Salah satu propinsi dengan *stunting* tertinggi di Indonesia tahun 2024 adalah Sulawesi Barat dengan daerah nelayannya mencapai 23.9%. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kolaborasi antara *stakeholder* terkait, penguatan layanan dan fasilitas kesehatan di setiap kabupaten/ kota, peningkatan infrastruktur dengan memperbaiki sarana sanitasi serta penyediaan fasilitas air bersih dalam peningkatan kualitas kegiatan posyandu.

Implementasi program-program ini diharapkan dapat berdampak pada meningkatkan asupan gizi anak, fasilitas sanitasi lingkungan yang baik, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, sehingga mampu menekan angka *stunting* di kampung nelayan. Strategi ini, diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah *stunting* secara komprehensif di wilayah pesisir.



Anak-anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki kemampuan intelektual lebih rendah dibandingkan dengan yang tumbuh normal. Kemiskinan ini, berdampak pada *stunting* yang menyebabkan memiliki resiko 50% lebih tinggi dalam hal kesulitan belajar di sekolah. Selain berdampak pada kesulitan menyerap pelajaran, dapat berpengaruh pada pertumbuhan menjadi orang dewasa yang kurang produktif. (Vadivel, 2023). Hambatan lain yang dihadapi keluarga nelayan adalah ekonomi, ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *stunting* pada anak-anak nelayan. (N.W. Pranoto, 2024).

Sebagian besar nelayan bergantung pada hasil tangkapan ikan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim. Ketidakpastian ini menyebabkan kesulitan dalam perencanaan keuangan, mengakibatkan rendahnya keluarga nelayan membeli makanan bergizi. (Mahary, 2023). Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada anak-anak keluarga nelayan mencapai 30%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 19% (Kemenkes, 2023).

Berdasarkan data nasional jumlah *stunting* anak yaitu 15.904.224, dengan kriteria pendek sejumlah 728.559, dan sangat pendek sejumlah 238.660, dengan prosentase *stunting* sebesar 6.1% (Kementerian Dalam Negeri, Oktober 2024). Berikut gambaran dari salah satu daerah nelayan, yaitu provinsi Sulawesi Barat yang mengalami tingkat kasus *stunting* paling tinggi sebesar 23.9%.

Deskripsi Masalah

Beberapa akar permasalahan yang ditemukan sebagai penyebab *stunting* di kampung nelayan di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

Kegiatan Posyandu di tingkat Kabupaten/Kota belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam penanganan kesehatan masyarakat, terutama karena selama ini lebih dipandang sebagai rutinitas semata. Banyak Posyandu yang menjalankan program tanpa adanya inovasi atau pengembangan yang berarti, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung monoton dan kurang menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi;

Dana di Kabupaten/ Kota untuk *stunting* belum maksimal dalam pemanfaatannya khususnya untuk PMT (Pemberian makanan tambahan), dimana dana intervensi dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak semua dilaksanakan. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses pangan yang bergizi, keterbatasan sayur-mayur, buah-buahan, dan makanan berprotein tinggi lain yang dapat mengakibatkan kurangnya asupan gizi seimbang bagi anak-anak. Masyarakat nelayan bergantung pada makanan pokok yang murah namun kurang bergizi, seperti makanan instan sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi anak dan perkembangan anak tidak optimal;

Belum optimalnya networking lintas sektor menjadi salah satu kendala dalam pergerakan masyarakat nelayan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta ketidakselarasan antara sektor-sektor tersebut mengakibatkan kurangnya integrasi program dan pelayanan;

Kurangnya pendidikan tentang kesehatan dan gizi, yaitu pentingnya pengetahuan tentang makanan sehat bergizi untuk perkembangan anak, pola empat sehat lima sempurna, pola asuh anak, perhatian lingkungan yang sehat, tentunya sangat berdampak pada tumbuh kembang anak. Dengan edukasi yang terbatas, pola asuh gizi dan pola makan anak-anak di kampung nelayan menjadi tidak optimal, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang sangat krusial untuk mencegah *stunting*. Dimana berpengaruh pada Sanitasi dan air bersih yang kurang memadai, menyebabkan berbagai penyakit infeksi, terutama diare dan penyakit pencernaan lainnya yang menghambat penyerapan nutrisi pada anak;

Budaya dan pola asuh yang kurang mendukung, pola asuh dan praktik pemberian makan anak tidak selaras dengan standar gizi yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi keluarga nelayan, dimana penghasilan ekonomi sangat tergantung sektor perikanan yang bergantung cuaca membuat pendapatan keluarga nelayan tidak stabil.



Misalnya, pemberian makanan pendamping ASI (Air Susu Ibu) yang tidak sesuai usia atau kebiasaan menyusui yang dihentikan lebih awal dapat mengurangi asupan gizi yang diperlukan anak karena kondisi keadaan lingkungan. Dampak dari masalah stunting berpengaruh pada kelangsungan kehidupan secara jangka pendek dan panjang. Hal ini berdampak pada pertumbuhan kesehatan anak dan masyarakat, produktivitas generasi muda, perekonomian lokal serta kehidupan sosial yang berlangsung di lingkungan kampung nelayan;

Alternatif Kebijakan

Adapun alternatif solusi yang ditawarkan adalah:

Pertama, Membangun kolaborasi antara dinas dan stakeholder terkait. Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian serta tenaga kesehatan di setiap kabupaten kota di wilayah Sulawesi Barat untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang dan pola asuh terhadap anak khususnya bagi ibu hamil dan menyusui agar memahami pentingnya nutrisi bagi anak selama 1000 hari pertama kehidupan;

Kedua, Penguatan layanan dan fasilitas Kesehatan di setiap kabuten kota Peningkatan layanan di Posyandu dan Puskesmas dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan sehingga masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir dalam hal ini kampung nelayan mudah mendapatkan layanan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan dengan adanya pelatihan dan pendidikan standar kecakapan kader posyandu di Sulawesi Barat dalam pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan penyakit yang umum terjadi di daerah nelayan serta sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yaitu orang yang bertugas untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah untuk mencegah demam berdarah;

Ketiga, Peningkatan infrastruktur dengan memperbaiki sarana sanitasi dan penyediaan fasilitas air bersih dalam peningkatan kualitas kegiatan Posyandu. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Dinas Perumahan Permukiman baik Provinsi Sulawesi Barat

dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/ Kota dengan melibatkan Camat, Lurah serta Kepala Desa di wilayah Sulawesi Barat, dengan begitu pembangunan sarana sanitasi dan penyediaan fasilitas air bersih lebih tepat sasaran, sehingga pelaksanaan kegiatan Posyandu semakin berkualitas dan menarik minat warga kawasan nelayan untuk berperan aktif.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten kota wilayah Sulawesi Barat khususnya pada Pemerintah Daerah Majene dalam upaya penurunan stunting adalah pengambilan Kebijakan harus mengedepankan pendekatan kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan penguatan layanan kesehatan dan peningkatan infrastruktur sanitasi secara simultan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1.
- Chilyabanyama ON, Chilengi R, Simuyandi M, Chisenga CC, Chirwa M, Hamusonde K, Saroj RK, Iqbal NT, Ngaruye I, Bosomprah S. Performance of Machine Learning Classifiers in Classifying Stunting among Under-Five Children in Zambia. *Children*. 2022 Juli 20;9(7): 1082. PMID: 35884066; PMCID: PMC9320245.DOI:10.3390/children9071082
- Morales F, Montserrat-de la Paz S, Leon MJ, Rivero-Pino F. Effects of Malnutrition on the Immune System and Infection and the Role of Nutritional Strategies Regarding Improvements in Children's Health Status: A Literature Review. *Nutrients*. 2023 Dec 19;16(1):1. PMID: 38201831; PMCID: PMC10780435; DOI: 10.3390/nu16010001.